



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka disesuaikan dengan urusan pemerintahan, perangkat daerah, program dan indikator kinerja pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revius atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013–2018 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 24) diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Di undangkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

 
IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TANGGAL 13 JUNI 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Validator
<p>Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib</p> <p>Tujuan 1: Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat</p> <p>Indikator Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat 2. Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 							
1	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelanggaran perda/perkada yg <u>diselesaikan x 100%</u> Jumlah pelanggaran erda/perkada yang dilaporkan/dipantau	%	Satpol PP dan Damkar	Satpol PP dan Damkar	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang <u>ditindaklanjuti x 100%</u> Jumlah pengaduan yang diterima dalam 1 (satu) tahun	%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
2	Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah PMKS yang memperoleh <u>bantuan sosial dalam 1 tahun x 100%</u> Jumlah PMKS skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	%	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa <u>tanggap darurat x 100%</u> Jumlah korban bencana	%	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
3	Terwujudnya kesetaraan gender	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga <u>pemerintah x 100 %</u> Jumlah pekerja perempuan	%	BKD dan PSDM	BKD dan PSDM	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

		Cakupan keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang mengikuti proses perencanaan pembangunan (0 – 18 tahun) $\times 100 \%$ jumlah anak keseluruhan (0 – 18 tahun)	%	Dinas PPKB dan PPPA	Dinas PPKB dan PPPA	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
<p>Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah</p> <p>Tujuan 2 : Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar</p> <p>Indikator Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi; 2. Angka partisipasi angkatan kerja; 3. Nilai realisasi investasi. 							
4	Menurunnya angka kemiskinan	Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I	Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun berkenan	KK	Dinas PPKB dan PPPA	Dinas PPKB dan PPPA	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
5	Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju pertumbuhan ekonomi.	Produksi Padi	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

		Produksi Palawija	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Produksi Sayur-sayuran	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Produksi Sektor Perkebunan	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
6	Meningkatnya pendapatan perkapita	Meningkatnya PDRB Perkapita	PDRB tahun berkenan	Rp.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Jumlah daya beli masyarakat	Rp.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
7	Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja} \times 100 \%}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}}$	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat							
Tujuan 3 : Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan							
Indikator Tujuan:							
1. Angka melek huruf;							
2. Indeks pembangunan manusia.							
8	Meningkatnya akses dan pemerataan Pendidikan masyarakat	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah siswa yang lulus pada jenjang <u>SD/MI x 100 %</u> Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah siswa yang lulus pada jenjang <u>SMP/MTs x 100 %</u> Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
9	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah siswa yang putus sekolah pada <u>jenjang SD/MI x 100 %</u> Jumlah siswa pada jenjang SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah siswa yang putus sekolah pada <u>jenjang SMP/MTs x 100 %</u> Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

		Rasio ruang kelas/rombongan belajar	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas} \times 100 \%}{\text{Jumlah rombongan belajar}}$	Rasio	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Rasio guru tetap/murid	$\frac{\text{Jumlah guru} \times 100 \%}{\text{Jumlah Murid}}$	Rasio	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
10	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur x	Thn	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Angka kesakitan	Gambaran kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Angka kematian ibu	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan} \times 100.000}{\text{jumlah bayi yang lahir hidup}}$	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Angka kematian bayi	$\frac{\text{jumlah kematian bayi} \times 1.000}{\text{jumlah bayi yang lahir hidup}}$	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan

		Prevalensi gizi kurang	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{100 \% \text{ jumlah balita yang ditimbang}}$	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Prevalensi gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita yang ditimbang}} \times 100 \%$	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
<p>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Bersih</p> <p>Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima</p> <p>Indikator Tujuan:</p> <p>1. Indeks kepuasan masyarakat</p>							
11	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah kasus penyalagunaan keuangan berdasarkan hasil temuan aparat pengawas	$\frac{\text{Jumlah kasus penyalahgunaan keuangan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kasus pelanggaran}} \times 100 \%$	%	Inspektorat	Inspektorat	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
		Opini BPK	Berdasarkan kategori opini BPK terhadap hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Akuntansi

12	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peringkat kemudahan berusaha	Lamanya waktu pengurusan izin <u>x 100%</u> Jumlah perijinan yang diterbitkan	%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
13	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Instansi pemerintah yang akuntabel	Jumlah OPD yang menyampaikan <u>laporan kinerja tepat waktu x 100%</u> Jumlah OPD	%	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TANGGAL 13 JUNI 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahunan					Kondisi Akhir
				2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	50	60	70	80	90	100	100
2.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	16.66	33.33	50	66.66	84.84	100	100

3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	44.44	47.55	50.66	53.77	56.88	60	60
4.	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	25	26	27	28	29	30	30
6.	Cakupan keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	23.498
7.	Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I	KK	32.963	31.070	29.177	27.824	25.391	23.498	23.498
8.	Produksi Padi	Ton	25.104	27.862,60	30.621,20	33.379,80	36.138,40	38.897	38.897
9.	Produksi Palawija	Ton	104.261	105.304	106.347	107.390	108.433	109.476	109.476
10.	Produksi Sayur-sayuran	Ton	270.925	276.344	281.763	287.182	292.601	298.020	298.020

11.	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	21.692	22.123,60	22.555,20	22.986,80	23.418,40	23.850	23.850
12.	Meningkatnya PDRB Perkapita	Rp.	6.694.324	7.105.105,40	7.515.886,80	7.926.668, 20	8.337.449,60	8.748.231	8.748.231
13.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp.	602.536	610.369	618.202	626.035	633.868	641.701	641.701
14.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,77	72,72	74,66	76,61	78,55	80,50	80,50
15.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,93	98,94	98,60	98,97	98,99	99,00	99,00
16.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	95,67	95,74	95,80	95,87	95,93	96,00	96,00
17.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,3	1,19	1,08	0,98	0,87	0,76	0,76
19.	Rasio ruang kelas/rombongan belajar	Rasio	1 : 1,10	1 : 1,08	1 : 1,06	1 : 1,04	1 : 1,02	1 : 1,00	1 : 1,00
20.	Rasio guru tetap/murid	Rasio	1 : 35	1 : 34	1 : 34	1 : 34	1 : 34	1 : 32	1 : 32
21.	Umur harapan hidup	Thn	69,32	69,46	69,59	69,73	69,86	70,00	70,00
22.	Angka kesakitan	%	42,51	41,65	40,79	39,93	39,07	38,21	38,21

23.	Angka kematian ibu	Per 100.00 OKH	97,00	93,60	90,20	86,80	83,40	80,00	80,00
24.	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	11,00	10,20	9,40	8,60	7,80	7,00	7,00
25.	Prevalensi gizi kurang	%	22,80	20,84	18,88	16,92	14,96	13,00	13,00
26.	Prevalensi gizi buruk	%	0,80	0,72	0,64	0,56	0,48	0,40	0,40
27.	Jumlah kasus penyalagunaan keuangan berdasarkan hasil temuan aparat pengawas	%	30,93	24,74	18,56	12,37	6,19	0,00	0,00
28.	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	Peringkat kemudahan berusaha	%	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	75,00
30.	Instansi pemerintah yang akuntabel	%	0,00	16,00	32,00	48,00	64,00	80,00	80,00

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA